



Isu Strategis dan Program/Kegiatan Prioritas Indikatif Pembangunan Hijau Sumatera Selatan 2018-2028

Pembelajaran dari Proses Penyusunan Masterplan
Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku (Kelola Sendang)

September 2018



PENABULU FOUNDATION
CIVIL SOCIETY RESOURCE ORGANIZATION



Penabulu Palembang
Jl. Manunggal 1 No. 3B
Ilir Barat II, Palembang, 30144

Penabulu Jakarta
Komplek Rawa Bambu I Jalan D No. 6
Pasar Minggu, Jakarta Selatan, 12520
Phone : (021) 78848321, (021) 22708103
Fax : (021) 78848321

TIM PENYUSUN

Pengarah

Regina Ariyanti, S.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)

Dr. Syafrul Yunardy, S.Hut., M.E. (Dinas Kehutanan Prov. Sumsel)

Koordinator Tim

Ir. Hendrian, M.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)

Anggota Tim

- Yanuar Suhartono, S.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
- Ir. Ismail Darwin (BAPPEDA Prov. Sumsel)
- H. Dwiva Putra, SP, M.S.E. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
- Ridawana, S.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
- Ariyati, ST., M.P.A. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
- Nurfadiela, S.T. (BAPPEDA Prov. Sumsel)
- Tim ZSL-KELOLA Sendang
- Yayasan Penabulu

Narasumber Utama

- Anggota PSU-PIU KELOLA Sendang
- Anggota POKJA Pembangunan Hijau Kabupaten Musi Banyuasin
- Anggota POKJA Pembangunan Hijau Kabupaten Banyuasin
- Ir. H. Hadenli Ugihan, M.Si. (Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Prov. Sumsel)
- Ir. H. Anung Riyanta, M.Sc. (Dinas Perkebunan Prov. Sumsel)
- Sutomo, S.Hut, M.Si. (Dinas Kehutanan Prov. Sumsel)
- Faustino Do Carmo, S.T. (Dinas PU Bina Marga dan Tata Ruang Prov. Sumsel)
- Yuwono Aries, S.T., M.T. (BAPPEDA Kab. Musi Banyuasin)
- Erica Oktariani, S.T. (BAPPEDA Kab. Musi Banyuasin)
- Iwan Adi Ratmoko, S.Hut., M.Si. (BAPPEDA Kab. Banyuasin)
- Lisdawati, S.P., M.Si. (BAPPEDA Kab. Banyuasin)
- Dr. Erwin Martin, S.Hut., M.Si. (Balitbanghut Prov. Sumsel)
- Octavia Susilowati, S. Hut. (Balai KSDA Prov. Sumsel)
- Affan Absori, S.T. (Balai TN Berbak dan Sembilang)
- Ir. Zulfikar, MM. (PT. GAL)
- Harry Hartanto (GAPKI)
- Iwan Setiawan, S.Hut. (APHI)
- Ernita Sriwahyuni, S.P. (APHI)

A

Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang Dangku (Kelola Sendang)

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui visi **Pertumbuhan Ekonomi Hijau**¹ telah bertekad untuk mewujudkan pembangunan regional yang berkelanjutan, dengan menjaga keseimbangan antara aspek pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial dan kelestarian lingkungan, serta ditopang oleh kekuatan pondasi kerjasama dan kemitraan pembangunan antara pemerintah, sektor swasta dan masyarakat.

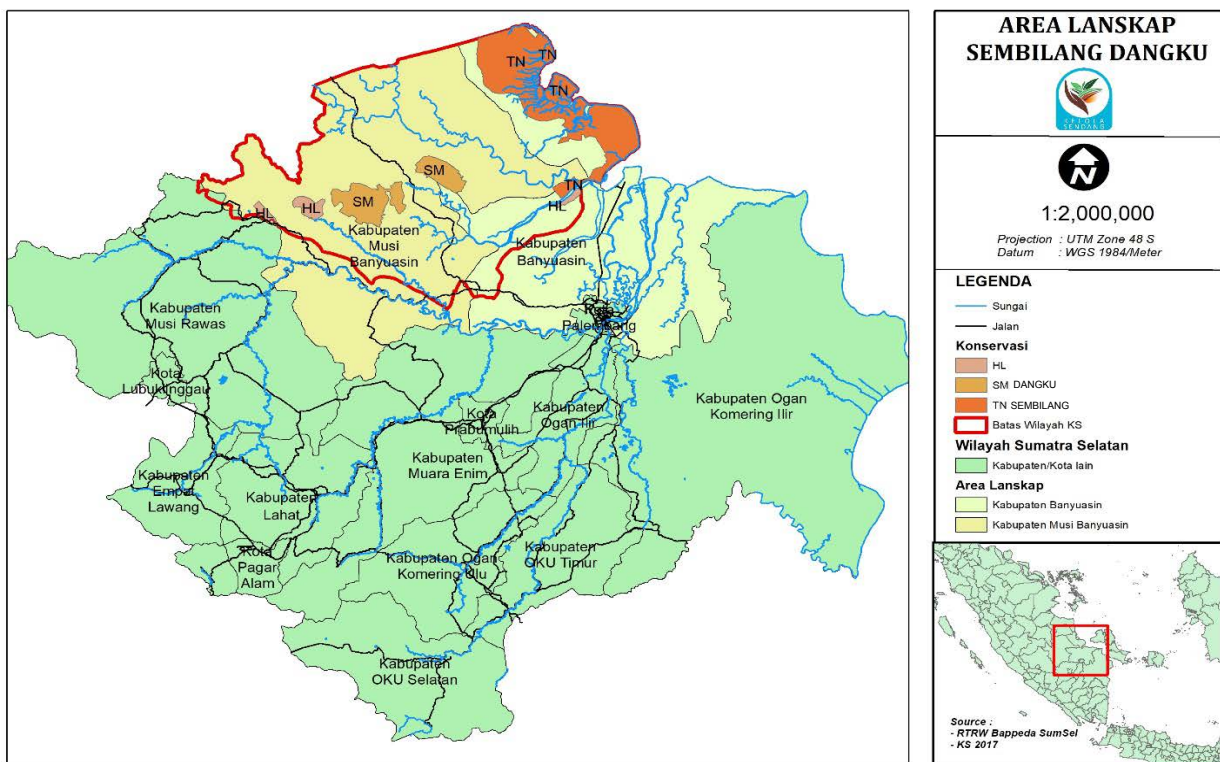
Seiring dengan komitmen Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tersebut, sejak akhir tahun 2015, Pemerintah Inggris (United Kingdom Climate Change Unit) dan Pemerintah Norwegia melalui **Proyek KELOLA SENDANG** yang dilaksanakan oleh Konsorsium ZSL telah memberikan dukungan bagi pengembangan kebijakan dan kelembagaan pendukung serta model kemitraan tata kelola pada tingkat eko-regional berbasis pendekatan lanskap berkelanjutan.

Proyek KELOLA SENDANG mengembangkan permodelan pembangunan hijau dengan bekerja di **Lanskap Sembilang-Dangku**, dengan luas sekitar 1,6 juta hektar (sekitar 21,8% dari total luasan wilayah Provinsi Sumatera Selatan), yang wilayahnya terletak di Kabupaten Musi Banyuasin dan Kabupaten Banyuasin. Lanskap ini berada di Daerah Aliran Sungai (DAS) Musi, yang aliran sungainya mengalir melalui Taman Nasional Berbak-Sembilang ke arah timur, dan juga mencakup kawasan prioritas restorasi lahan gambut di Sumatera Selatan. Lanskap Sembilang-Dangku mewakili keragaman ekologi dan sosial-ekonomi yang tercermin dalam karakteristik ekosistem

¹ Peraturan Gubernur No. 21/2017 tentang Rencana Induk Pertumbuhan Ekonomi Hijau Provinsi Sumatera Selatan

dan peran para pihak di dalamnya, termasuk masyarakat lokal yang tinggal di daerah ini. Lanskap ini merupakan daerah yang potensial dalam upaya pengurangan emisi GRK, yang dapat dicapai melalui perlindungan dan peningkatan kualitas pengelolaan hutan dan lahan gambut.

Lanskap ini terbagi menjadi dua tipologi biofisik, yaitu pertama adalah area lanskap yang terletak di utara dan timur Sungai Lalan yang didominasi oleh lahan gambut dan hutan bakau di sekitar Taman Nasional Sembilang. Di daerah ini, terdapat beberapa konsesi swasta yang bekerja di sektor kehutanan dan juga terdapat Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Lalan-Mangsang-Mendis dan KPH Lalan-Sembilang. Di kawasan ini juga terdapat wilayah restorasi ekosistem, dua hutan desa, dan kawasan hutan yang masih belum dibebani ijin pemanfaatan. Kawasan kedua adalah area yang terletak di selatan dan barat Sungai Lalan yang didominasi oleh tanah mineral yang membentang di sepanjang dataran rendah Sumatera Selatan. Di kawasan ini terdapat beberapa perusahaan perkebunan kelapa sawit dan desa-desa transmigrasi yang telah ada sejak tahun 1980-an. Hutan di daerah ini berada di bawah KPH Meranti serta Suaka Margasatwa (SM) Dangku dan SM Bentayan.



Lanskap Sembilang-Dangku memiliki fungsi penting sebagai kawasan konservasi karena mencakup lokasi prioritas restorasi lahan gambut dan mencakup wilayah tiga kawasan konservasi didalamnya, namun juga sekaligus merupakan lanskap produksi karena 67,48% dari total luasan lanskap merupakan hutan produksi dan perkebunan. Lanskap ini juga menjadi tumpuan penghidupan masyarakat yang sebagian besar mata pencaharian penduduk bersumber pada pengelolaan sumber daya alam seperti pertanian, perkebunan dan kehutanan sesuai dengan karakteristik tanah pada masing-masing tipologi biofisik. Lanskap ini mencakup 12 kecamatan

di Kabupaten Musi Banyuasin dan 7 kecamatan di Kabupaten Banyuasin. Jumlah penduduknya sekitar 816.748 jiwa penduduk dari 223 desa yang terdiri dari desa-desa tradisional dan desa transmigrasi.

Lanskap Sembilang-Dangku menghadapi sejumlah tantangan terkait kompleksitas pemanfaatan lahan dan sumber daya alam di daerah ini, antara lain adalah penebangan liar, degradasi lahan gambut dan kebakaran hutan, serta kompetisi pemanfaatan lahan antar sektor pembangunan. Kurangnya sinergi antar pihak berdampak pada praktek pengelolaan sumber daya alam yang tidak berkelanjutan. Akibatnya tekanan pada hutan dan lahan gambut menjadi lebih besar seiring dengan perluasan industri berbasis lahan dan hutan seperti perusahaan-perusahaan kelapa sawit, kayu, dan perusahaan tambang. Konflik penguasaan lahan dan tenurial antara berbagai pihak juga merupakan masalah utama yang perlu segera ditangani. Pemberdayaan dan penguatan penghidupan masyarakat pada lanskap ini sebagai bagian dari upaya pengurangan tingkat kemiskinan di kawasan perdesaan merupakan tantangan yang menyertai pengelolaan berkelanjutan Lanskap Sembilang-Dangku.

Rencana Kolaborasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang-Dangku

Secara umum, Proyek KELOLA SENDANG bertujuan mendukung pelaksanaan pengelolaan lanskap yang terpadu melalui kemitraan publik-swasta-masyarakat dalam rangka pencapaian visi pembangunan hijau di Sumatera Selatan. Tujuan ini kemudian diterjemahkan ke dalam empat sasaran yaitu : (i) mendukung penyediaan data dan pengelolaan informasi lanskap yang terpadu; (ii) memperkuat tata kelola dan kebijakan; (iii) peningkatan kapasitas dan pengembangan model percontohan dan praktik di tingkat lokal; (iv) mendukung pengembangan kerjasama dan mobilisasi sumberdaya. Proyek bekerja melalui 5 komponen utama yaitu: komponen program pada aspek produksi, aspek konservasi, aspek penghidupan masyarakat, aspek kelembagaan dan kebijakan, serta aspek pengelolaan pengetahuan.

Untuk mewujudkan kolaborasi publik-swasta-masyarakat yang bermakna dalam pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku secara berkelanjutan dibutuhkan lima elemen kemitraan yaitu:

1. Platform dialog dan komunikasi berbagai pemangku kepentingan yang setara dan konstruktif;
2. Pemahaman bersama tentang kondisi lanskap serta tantangan dan peluang yang dimiliki;
3. Rencana kolaboratif kemitraan pengelolaan lanskap;
4. Aksi kemitraan pengelolaan lanskap yang adaptif; serta
5. Pemantauan dan evaluasi.

Sebagai salah satu elemen kemitraan dalam mengimplementasikan pendekatan lanskap berkelanjutan, Proyek KELOLA SENDANG mengembangkan **Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku 2018-2028** yang menyajikan rencana induk pengembangan kemitraan pengelolaan lanskap di kawasan Sembilang-Dangku untuk mewujudkan tujuan-tujuan pembangunan berkelanjutan dalam kerangka Pertumbuhan Ekonomi Hijau di Provinsi Sumatera Selatan.

Masterplan KELOLA SENDANG merupakan bentuk dokumen perencanaan kolaboratif untuk mengembangkan rencana aksi kemitraan di Lanskap Sembilang-Dangku. Masterplan KELOLA SENDANG disusun berdasarkan hasil pencermatan para pihak terhadap kondisi, permasalahan dan potensi/peleluang pada aspek produksi, konservasi dan penghidupan masyarakat; yang kemudian disertai proses pembahasan dan penyepakatan harapan kolektif atas kondisi lanskap di masa mendatang dengan terwujudnya kelestarian sumber daya alam dan lingkungan serta pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Masterplan KELOLA SENDANG mengintegrasikan perencanaan para pemangku kepentingan terkait pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku dalam tema-tema kolaborasi tertentu yang dikembangkan berdasarkan isu strategis kawasan yang telah dirumuskan sebelumnya melalui pemetaan atas permasalahan pengelolaan mendasar yang terjadi dan potensi yang dimiliki lanskap, telaah kelembagaan dan kebijakan, upaya konsolidasi dan sinkronisasi dengan dokumen perencanaan para pemangku kepentingan serta hasil serial diskusi kelompok terfokus dan lokakarya multipihak yang telah diselenggarakan selama kurun waktu tahun 2018.

Pemerintah daerah Provinsi Sumatera Selatan mengambil tongkat kepemimpinan dalam penyusunan Masterplan KELOLA SENDANG melalui Tim Project Supervisory Unit – Project Implementation Unit (PSU-PIU) KELOLA SENDANG yang didukung oleh beberapa unsur tenaga ahli dari instansi pemerintah baik pusat maupun daerah, perguruan tinggi, perusahaan, dan lembaga swadaya masyarakat.

Masterplan KELOLA SENDANG disusun berbasis kombinasi beberapa pendekatan, yaitu: a) Pendekatan Teknokratis, dimana penyusunan dokumen didasarkan pada pertimbangan dan kerangka pikir yang rasional, sistematis dan mengacu pada data dan hasil-hasil penelitian; b) Pendekatan Legal Formal, dimana penyusunan dokumen mengacu dan mempertimbangkan kebijakan-kebijakan pemerintah dengan perhatian khusus pada kebijakan-kebijakan terkait dengan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah serta kebijakan pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup; dan c) Pendekatan Partisipatif, dimana pemetaan terhadap aspirasi para pihak menjadi salah satu pertimbangan utama, baik dari pemerintah, pihak swasta maupun masyarakat.

Selain itu dalam menyusun rancangan program dan kegiatan juga digunakan pendekatan Tematik, Holistik, Integratif dan Spasial (THIS) sebagai pendekatan perencanaan terkini yang mendorong terjadinya sinergi antar sektor pembangunan.

Rencana Kolaborasi Pengelolaan Lanskap Berkelanjutan Sembilang-Dangku

Visi Lanskap Sembilang-Dangku 2028 dinyatakan secara kolektif sebagai berikut:

Terwujudnya lanskap berkelanjutan melalui kemitraan masyarakat–pemerintah–swasta yang kuat dan efektif pada Lanskap Sembilang Dangku untuk meraih kelestarian lingkungan hidup dan sumberdaya alam serta mewujudkan ekonomi inklusif untuk kesejahteraan masyarakat.

Sedangkan tujuan jangka menengah per lima tahun periode pembangunan dinyatakan sebagai berikut:

I

Periode Jangka Menengah I (2018-2023)

1. Mendorong terwujudnya integrasi kerangka kerja kolaboratif dan tematik;
2. Mengembangkan dukungan kebijakan yang dibutuhkan;
3. Melakukan mainstreaming model kemitraan pada perencanaan pembangunan daerah;
4. Memperkuat komitmen kemitraan menuju kemitraan yang fungsional dan implementatif melalui pengembangan Rencana Aksi Kemitraan pada Area Model;

5. Memperkuat basis data baik tingkat tapak (area model) maupun tingkat lanskap;
6. Mengembangkan forum multipihak yang dinamis dan efektif dalam mendorong berkembangnya kemitraan lanskap; dan
7. Mengembangkan skema evaluasi kolaboratif berbasis pada analisa dampak dan manfaat.



Periode Jangka Menengah II (2023-2028) yang akan melingkupi tujuan jangka menengah pada periode sebelumnya adalah sebagai berikut:

1. Memperluas area aksi kemitraan di dalam lanskap sembilan dangku;
2. Melakukan analisis tentang kontribusi pendekatan lanskap terhadap pertumbuhan ekonomi hijau;
3. Mengembangkan kebijakan untuk memperkuat implementasi pendekatan lanskap; dan
4. Mengembangkan media pembelajaran untuk pengembangan pendekatan lanskap di wilayah Sumatera Selatan lainnya.

Visi Lanskap Sembilang-Dangku 2028 di atas ditopang oleh keyakinan mendalam bahwa pengelolaan lanskap berkelanjutan hanya mungkin terwujud jika kondisi pertumbuhan ekonomi yang inklusif bersanding dengan lestarnya daya dukung lingkungan hidup dan sumber daya alam. Lestarnya daya dukung lingkungan dan sumber daya alam memiliki 2 dimensi sasaran yaitu: 1) penurunan emisi gas rumah kaca, dan 2) pelestarian keanekaragaman hayati. Sedangkan 5 dimensi sasaran pertumbuhan ekonomi yang inklusif meliputi: 3) peningkatan jumlah dan mutu tenaga kerja produktif, 4) tersedianya infrastruktur ekonomi yang memadai, 5) berkurangnya kemiskinan dan ketimpangan, 6) terwujudnya kesetaraan gender dan 7) meningkatnya perlindungan sosial bagi seluruh lapisan masyarakat.



Isu Strategis dan Program/Kegiatan Prioritas Indikatif Pembangunan Hijau Sumatera Selatan

Sadari awal disadari bahwa Proyek KELOLA SENDANG ditujukan sebagai model pembelajaran dari upaya kolaboratif para aktor pembangunan dalam menyeimbangkan kepentingan produksi dan konservasi berbasis pendekatan lanskap berkelanjutan. Pembelajaran dari Proyek KELOLA SENDANG diharapkan kemudian dapat menjadi modal dasar bagi implementasi pendekatan lanskap berkelanjutan secara utuh dalam proses pembangunan di Provinsi Sumatera Selatan dalam jangka panjang, maupun di wilayah lain di Indonesia pada umumnya.

Pada bagian berikut, disarikan isu strategis dan program prioritas yang terpetakan dalam penyusunan Masterplan KELOLA SENDANG (sumber dokumen lengkap: Masterplan Kemitraan Pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku, Project Supervisory Unit – Project Implementation Unit, September 2018; **Bab 7. Rancangan Pengembangan Kemitraan Pengelolaan Lanskap**).

Sebagaimana profil Lanskap Sembilang-Dangku yang diproyeksikan mampu mewakili sebagian besar karakteristik wilayah Provinsi Sumatera Selatan, maka butir-butir isu strategis dan program prioritas di bawah ini diharapkan dapat menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan dan dapat ditempatkan sebagai masukan tematik dan indikatif bagi proses penyusunan RPJMD Provinsi Sumatera Selatan 2018-2023 yang saat ini sedang berlangsung.

Terdapat **13 Isu Strategis** hasil dari serangkaian diskusi multipihak dan pemetaan kondisi pengelolaan lanskap dengan permodelan pada Lanskap Sembilang-Dangku, yang secara umum diyakini juga menjadi permasalahan utama di kawasan lain di Provinsi Sumatera Selatan, yaitu:

- Konflik pemanfaatan lahan,
- Pembalakan liar dan pertambangan tanpa ijin,
- Ancaman kebakaran hutan dan lahan,
- Degradasi ekosistem hutan dan rawa gambut,
- Konflik antara manusia dan satwa,
- Produktivitas pertanian rendah,
- Nilai tambah komoditas pertanian rendah,
- Fluktuasi harga komoditas utama,
- Variasi produk pertanian rendah,
- Tingkat kemiskinan yang masih tinggi,
- Tingkat pendidikan yang masih rendah,
- Akses masyarakat atas sumber daya dan lahan minim, dan
- Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar.

Ketigabelas Isu Strategis di atas kemudian dikelompokkan menjadi 5 Kelompok Program dengan rincian Program dan Kegiatan Prioritas per masing-masing Kelompok Program sebagai berikut:

Tema Kelompok Program 1. Pelestarian Ekosistem dan Perbaikan Tutupan Lahan

Program Prioritas	Target	Indikator 2028
<p><i>a. Perbaikan tutupan lahan</i> Kegiatan Prioritas: 1) Pemberantasan pembalakan liar, 2) Rehabilitasi lahan kritis, 3) Reklamasi bekas tambang, dan 4) Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan.</p>	Terjadi perbaikan tutupan lahan	5% per tahun luas lahan kritis berkurang (di luar kawasan konservasi)
<p><i>b. Optimalisasi fungsi kawasan konservasi</i> Kegiatan Prioritas: 5) Pengamanan kawasan konservasi, 6) Penanganan perambahan kawasan konservasi, dan 7) Restorasi ekosistem.</p>	Persentase luas kawasan yang utuh meningkat	50% luas kawasan terganggu berkurang
<p><i>c. Pelestarian spesies prioritas</i> Kegiatan Prioritas: 8) Pemulihan habitat, dan 9) Penanganan perburuan dan perdagangan liar spesies prioritas.</p>	Meningkatnya populasi spesies prioritas pada lanskap	20% peningkatan populasi spesies prioritas

Tema Kelompok Program 2. Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya dan Lahan

Program Prioritas	Target	Indikator 2028
<p>a. <i>Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan berkelanjutan oleh masyarakat</i></p> <p>Kegiatan Prioritas: 10) Pemanfaatan HHBK berkelanjutan, dan 11) Pemanfaatan jasa lingkungan berkelanjutan,</p>	<p>Peningkatan jumlah usaha berbasis keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan.</p>	<p>10 unit usaha baru</p>
<p>b. <i>Penguatan akses kelola masyarakat</i></p> <p>Kegiatan Prioritas: 12) Penanganan konflik lahan kelola masyarakat, 13) Penguatan kapasitas para pihak, dan 14) Pengembangan PSDH pada lahan kelola masyarakat.</p>	<p>Meningkatnya luas lahan kelola legal masyarakat.</p>	<p>50% area PIAPS disahkan sebagai area perhutanan sosial</p>
<p>c. <i>Penguatan akses kepemilikan lahan</i></p> <p>Kegiatan Prioritas: 15) Penguatan kapasitas para pihak, dan 16) Penguatan akses legal kepemilikan lahan masyarakat.</p>	<p>Meningkatnya status kepemilikan lahan masyarakat</p>	<p>10% dari KK yang belum sertifikat</p>

Tema Kelompok Program 3. Perkebunan dan Hutan Tanaman Berkelanjutan

Program Prioritas	Target	Indikator 2028
<p>a. <i>Pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan perusahaan</i></p> <p>Kegiatan Prioritas: 17) Pengembangan sertifikasi sawit berkelanjutan dan Hutan Produksi Lestari, 18) Perlindungan sempadan sungai dan rawa di wilayah konsesi perusahaan, dan 19) Konservasi ekosistem gambut di dalam areal perusahaan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Luasan HCV pada wilayah perusahaan meningkat. Kualitas perairan meningkat dengan pengelolaan sempadan sungai sesuai dengan aturan yang berlaku 	<ul style="list-style-type: none"> Peningkatan areal HCV di areal perusahaan Kualitas air sungai di areal perusahaan baik atau maksimal tercemar ringan (PIj 0-5)
<p>b. <i>Pengurangan emisi sektor energi</i></p> <p>Kegiatan Prioritas: 20) penggunaan listrik (bauran) EBT, dan 21) Pengolahan sampah dan limbah menjadi bahan baku energi.</p>	<p>Penurunan emisi sektor energi</p>	<p>Penurunan emisi sektor energi sebesar 29%</p>

<p>c. <i>Peningkatan peran perusahaan dalam aksesibilitas masyarakat</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>22) Pembangunan jalan desa/antar desa oleh perusahaan, dan 23) Sinergi dengan perusahaan dalam pemberian aksesibilitas bagi masyarakat.</p>	<p>Panjang jalan yang dibangun perusahaan untuk masyarakat bertambah</p>	<p>50 km bantuan jalan kampung dari perusahaan</p>
<p>d. <i>Peningkatan peran perusahaan dalam produktivitas petani</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>24) Peningkatan kapasitas budi daya dan paska panen petani, 25) Fasilitasi sertifikasi petani dalam skema yuridiksi, dan 26) Pelibatan petani dalam rantai nilai perusahaan (inclusive business).</p>	<p>Meningkatnya pendapatan petani di desa sekitar perusahaan</p>	<p>Pendapatan petani di desa sekitar hutan naik 20%</p>
<p>e. <i>Peningkatan peran perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>27) Peningkatan akses air bersih warga, 28) Peningkatan kualitas sanitasi layak.</p>	<p>Jumlah rumah tangga dengan akses air bersih dan sanitasi dari perusahaan bertambah</p>	<p>2000 rumah tangga mendapatkan akses air bersih dan sanitasi dari perusahaan</p>
<p>f. <i>Peningkatan peran perusahaan dalam akses pendidikan masyarakat</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>29) Peningkatan sarana dan kualitas pendidikan formal, dan 30) Pengembangan pendidikan informal dan non-formal.</p>	<p>Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah meningkat dengan bantuan perusahaan</p>	<p>Angka Melek Huruf (AMH) 100% Rata-rata lama sekolah di atas 9 tahun di desa sekitar perusahaan</p>
<p>g. <i>Peningkatan peran perusahaan dalam kesehatan dan gizi masyarakat</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>31) Pengembangan pusat layanan gizi masyarakat desa, dan 32) Pengembangan tanaman pekarangan untuk pangan dan gizi.</p>	<p>Meningkatnya AHH, menurunnya Kasus Gizi Buruk</p>	<ul style="list-style-type: none"> • AHH naik sesuai dengan AHH provinsi • Tidak ada kasus gizi buruk di desa sekitar perusahaan

Tema Kelompok Program 4. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri di Pedesaan

Program Prioritas	Target	Indikator 2028
<p>a. <i>Peningkatan produktivitas petani</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>33) Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial petani/kelompok tani, 34) Peningkatan kapasitas dan kinerja kelompok tani, dan 35) Pengembangan kemitraan usaha.</p>	<p>Peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP)</p>	<p>NTP diatas 100%</p>
<p>b. <i>Pengembangan industri pengolahan di pedesaan</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>36) Penciptaan usaha pengolahan baru, terutama melalui pengembangan BUM Desa, dan 37) Perbaikan kinerja usaha pengolahan melalui pengembangan kemitraan dengan perusahaan.</p>	<p>Meningkatnya pendapatan regional dari sektor pengolahan</p>	<p>Peningkatan 20% pendapatan regional dari sektor pengolahan</p>
<p>c. <i>Penguatan akses permodalan dan pembiayaan</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>38) Kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan, dan 39) Pengembangan lembaga/sistem keuangan swadaya masyarakat (koperasi simpan pinjam/BUM Desa).</p>	<p>Meningkatnya serapan tenaga kerja dari sektor pengolahan</p>	<p>Peningkatan 20% serapan tenaga kerja sektor pengolahan</p>
<p>d. <i>Peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>40) Peningkatan kapasitas perempuan di sektor industri dan pertanian, 41) Pengembangan koperasi perempuan dan mendukung usaha-usaha kelompok perempuan.</p>	<p>Meningkatnya jumlah kredit untuk modal usaha</p> <p>Meningkatnya rasio Perempuan dalam Pekerjaan</p>	<p>Peningkatan 20% jumlah kredit untuk modal usaha</p> <p>30% tenaga kerja dari usaha yang dikembangkan adalah wanita</p>

Tema Kelompok Program 5. Pengembangan Sosial dan Budaya Masyarakat

Program Prioritas	Target	Indikator 2028
<p>a. <i>Penguatan Pemerintahan Desa</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>42) Penguatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa, 43) Penguatan sistem pengolahan data dan informasi pembangunan desa, 44) Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan Dana Desa, dan 45) Peningkatan kualitas pengelolaan potensi desa melalui BUM Desa.</p>	<p>Meningkatnya jumlah desa dengan RPJMDes yang tepat sasaran</p>	<p>50% desa memiliki RPJMDes yang tepat sasaran dan status WTP</p>
<p>b. <i>Pengembangan sistem perlindungan sosial desa</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>46) Penguatan sistem perlindungan kelompok rentan, 47) Peningkatan kualitas layanan dasar pada tingkat kecamatan dan desa (Puskesmas, Pustu dan Posyandu, SD dan SMP dan pelayanan Dukcapil).</p>	<p>Meningkatnya jumlah desa dengan status WTP</p>	<p>Terbangunnya sistem perlindungan sosial di 20 desa dengan pola kemitraan</p>
<p>c. <i>Pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat</i></p> <p>Kegiatan Prioritas:</p> <p>48) Tersusunnya strategi pemajuan kebudayaan daerah sesuai mandat UU Pemajuan Kebudayaan, 49) Penyelenggaraan kegiatan tradisi dan kesenian dan 50) Pengembangan kurikulum muatan lokal tentang budaya dan tradisi lokal.</p>	<p>Meningkatnya jumlah orang yang mendapatkan sistem perlindungan sosial desa</p> <p>Meningkatnya Jumlah kegiatan budaya, jumlah kurikulum muatan lokal terkait budaya dan tradisi</p>	<p>Tersedianya kurikulum muatan lokal berbasis ekosistem dan tradisi setempat dan terimplementasi pada 20 SD dan 10 SLTP</p>

5 Tema Kelompok Program di atas, yang telah dirinci menjadi **20 Program Prioritas** dan didukung oleh **50 Kegiatan Prioritas Indikatif** merupakan pilihan kombinasi menu program dan kegiatan yang dapat digunakan sebagai acuan dan panduan dalam mengembangkan rencana aksi kemitraan antara pemerintah–swasta–masyarakat pada tataran Lanskap Sembilang-Dangku, sebagai kontribusi pencapaian visi Pertumbuhan Ekonomi Hijau Sumatera Selatan.

Upaya untuk menyandingkan daftar Program dan Kegiatan Prioritas di atas dengan penetapan program dan kegiatan sesuai nomenklatur rencana kerja dan anggaran masing-masing OPD pada pemerintah pusat dan pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan perlu dilakukan, berbarengan dengan identifikasi inisiatif-inisiatif yang telah, sedang dan akan dikembangkan oleh sektor swasta, lembaga donor dan lembaga swadaya masyarakat dan kelompok masyarakat lainnya, guna mendapatkan peta utuh posisi, peran, sumber daya dan potensi kolaborasi para pihak dalam kerangka kemitraan pengelolaan Lanskap Sembilang-Dangku maupun bagi pengembangan kemitraan pembangunan Sumatera Selatan secara berkelanjutan.

Kontribusi Program dan Kegiatan Prioritas Bagi Pencapaian Tujuan SDGs

Melalui Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya kembali pada pelaksanaan Agenda Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Sustainable Development Goals) yang disahkan PBB pada tanggal 25 September 2015. SDG berisi 17 Tujuan dan 169 Target dan merupakan rencana aksi global untuk 15 tahun ke depan yang berlaku sejak 2016 hingga 2030, guna mengakhiri kemiskinan, mengurangi kesenjangan dan melindungi lingkungan. Dibawah ini disajikan kolom keterangan mengenai kontribusi masing-masing Program dan Kegiatan Prioritas kepada Tujuan SDG yang terkait:

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kontribusi ke Tujuan SDG
Tema Kelompok Program 1. Pelestarian Ekosistem dan Perbaikan Tutupan Lahan		
1. a. Perbaikan tutupan lahan	1) Pemberantasan pembalakan liar	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap Iklim (13) • Kehidupan di Darat (16)
	2) Rehabilitasi lahan kritis	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap Iklim (13) • Kehidupan di Darat (16)
	3) Reklamasi bekas tambang	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap Iklim (13) • Kehidupan di Darat (16)
	4) Penanggulangan kebakaran hutan dan lahan	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap Iklim (13) • Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (16)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kontribusi ke Tujuan SDG
1. b. Optimalisasi fungsi kawasan konservasi	5) Pengamanan kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap Iklim (13) • Kehidupan di Darat (16)
	6) Penanganan perambahan kawasan konservasi	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap Iklim (13) • Kehidupan di Darat (16)
	7) Restorasi ekosistem	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap Iklim (13) • Kehidupan di Darat (16)
1. c. Pelestarian spesies prioritas	8) Pemulihan habitat	<ul style="list-style-type: none"> • Aksi terhadap Iklim (13) • Kehidupan di Darat (16)
	9) Penanganan perburuan dan perdagangan liar species prioritas	<ul style="list-style-type: none"> • Kehidupan di Darat (16)

Tema Kelompok Program 2. Penguatan Akses Masyarakat Terhadap Sumber Daya dan Lahan

2. a. Pemanfaatan keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan berkelanjutan oleh masyarakat	10) Pemanfaatan HHBK berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (12)
	11) Pemanfaatan jasa lingkungan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (12)
2. b. Penguatan akses kelola masyarakat	12) Penanganan konflik lahan kelola masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Kemiskinan (1) • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan(10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
	13) Penguatan kapasitas para pihak	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan(10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
	14) Pengembangan PSDH pada lahan kelola masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Kemiskinan (1) • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan(10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kontribusi ke Tujuan SDG
2. c. Penguatan akses kepemilikan lahan	15) Penguatan kapasitas para pihak terkait penguatan akses kepemilikan lahan	• Mengurangi Kesenjangan (10)
	16) Penguatan akses legal kepemilikan lahan masyarakat	• Tanpa Kemiskinan (1) • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)

Tema Kelompok Program 3. Perkebunan dan Hutan Tanaman Berkelanjutan

3. a. Pengelolaan lingkungan hidup pada kawasan perusahaan	17) Pengembangan sertifikasi sawit berkelanjutan dan Hutan Produksi Lestari	• Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (12)
	18) Perlindungan sempadan sungai dan rawa di wilayah konsesi perusahaan	• Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (12) • Kehidupan di Darat (16)
	19) Konservasi ekosistem gambut di dalam areal perusahaan	• Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (12) • Kehidupan di Darat (16)
3. b. Pengurangan emisi sektor energi	20) Penggunaan listrik (bauran) EBT	• Pengembangan Listrik EBT (7) • Industri, Inovasi dan Infrastruktur (9) • Mengurangi Kesenjangan (10)
	21) Pengolahan sampah dan limbah menjadi bahan baku energi	• Industri, Inovasi dan Infrastruktur (9) • Aksi terhadap Iklim (13)
3. c. Peningkatan peran perusahaan dalam aksesibilitas masyarakat	22) Pembangunan jalan desa/antar desa oleh perusahaan	• Industri, Inovasi dan Infrastruktur (9) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
	23) Sinergi dengan perusahaan dalam pemberian aksesibilitas bagi masyarakat	• Industri, Inovasi dan Infrastruktur (9) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
3. d. Peningkatan peran perusahaan dalam produktivitas petani	24) Peningkatan kapasitas budi daya dan paska panen petani	• Industri, Inovasi dan Infrastruktur (9) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kontribusi ke Tujuan SDG
	25) Fasilitasi sertifikasi petani dalam skema yuridiksi	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (12) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
	26) Pelibatan petani dalam rantai nilai perusahaan (inclusive business)	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab (12) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
3. e. Peningkatan peran perusahaan dalam pemenuhan kebutuhan air bersih dan sanitasi	27) Peningkatan akses air bersih warga	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan dan Kesejahteraan (3) • Air Bersih dan Sanitasi (6)
	28) Peningkatan kualitas sanitasi layak	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan dan Kesejahteraan (3) • Air Bersih dan Sanitasi (6)
3. f. Peningkatan peran perusahaan dalam akses pendidikan masyarakat	29) Peningkatan sarana dan kualitas pendidikan formal	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Berkualitas (4) • Mengurangi Kesenjangan (10)
	30) Pengembangan pendidikan informal dan non-formal	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Berkualitas (4) • Mengurangi Kesenjangan (10)
3. g. Peningkatan peran perusahaan dalam kesehatan dan gizi masyarakat	31) Pengembangan pusat layanan gizi masyarakat desa	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Kelaparan (2) • Kesehatan dan Kesejahteraan (3)
	32) Pengembangan tanaman pekarangan untuk pangan dan gizi	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Kelaparan (2) • Kesehatan dan Kesejahteraan (3)

Tema Kelompok Program 4. Pengembangan Agrobisnis dan Agroindustri di Pedesaan

4. a. Peningkatan produktivitas petani	33) Peningkatan kemampuan teknis dan manajerial petani/kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)
	34) Peningkatan kapasitas dan kinerja kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)
	35) Pengembangan kemitraan usaha	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
4. b. Pengembangan industri pengolahan di pedesaan	36) Penciptaan usaha pengolahan baru, terutama melalui pengembangan BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (9)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kontribusi ke Tujuan SDG
		<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10)
	37) Perbaikan kinerja usaha pengolahan melalui pengembangan kemitraan dengan perusahaan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Industri, Inovasi, dan Infrastruktur (9) • Mengurangi Kesenjangan (10)
4. c. Penguatan akses permodalan dan pembiayaan	38) Kerjasama dengan lembaga keuangan/perbankan	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Kemitraan untuk Mencapai Tujuan (17)
	39) Pengembangan lembaga/sistem keuangan swadaya masyarakat koperasi simpan pinjam/BUM (Desa)	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)
4. d. Peningkatan kesetaraan gender di bidang ketenagakerjaan	40) Peningkatan kapasitas perempuan di sektor industri dan pertanian	<ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan Gender (5) • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi kesenjangan (10)
	41) Pengembangan koperasi perempuan dan mendukung usaha-usaha kelompok perempuan	<ul style="list-style-type: none"> • Kesetaraan Gender (5) • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)

Tema Kelompok Program 5. Pengembangan Sosial dan Budaya Masyarakat

5. a. Penguatan Pemerintahan Desa	42) Penguatan kualitas dan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
	43) Penguatan sistem pengolahan data dan informasi pembangunan desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
	44) Penguatan kapasitas pengelolaan keuangan Dana Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
	45) Peningkatan kualitas pengelolaan potensi desa melalui BUM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pertumbuhan Ekonomi dan Pekerjaan yang Layak (8) • Mengurangi Kesenjangan (10)

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Kontribusi ke Tujuan SDG
5. b. Pengembangan sistem perlindungan sosial desa	46) Penguatan sistem perlindungan kelompok rentan	<ul style="list-style-type: none"> • Tanpa Kemiskinan (1) • Kesehatan dan Kesejahteraan (3) • Kesetaraan Gender (5) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
	47) Peningkatan kualitas layanan dasar pada tingkat kecamatan dan desa (Puskesmas, Pustu dan Posyandu, SD dan SMP dan pelayanan Dukcapil)	<ul style="list-style-type: none"> • Kesehatan dan Kesejahteraan (3) • Pendidikan Berkualitas (4) • Kesetaraan Gender (5) • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
5. c. Pelestarian nilai budaya dan tradisi masyarakat	48) Tersusunnya strategi pemajuan kebudayaan daerah sesuai mandat UU Pemajuan Kebudayaan	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan(10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
	49) Penyelenggaraan kegiatan tradisi dan kesenian	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi Kesenjangan (10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)
	50) Pengembangan kurikulum muatan lokal tentang budaya dan tradisi lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Pendidikan Berkualitas (4) • Mengurangi Kesenjangan(10) • Keberlanjutan Kota dan Komunitas (11)

Pencapaian indikator pada masing-masing Program dan Kegiatan Prioritas di atas akan menjadi kontribusi nyata bagi upaya pencapaian Tujuan dan Target SDG secara nasional maupun global, dan terutama akan menjamin terwujudnya pembangunan berkelanjutan yang inklusif, pembangunan yang adil dan merata, dan pembangunan yang tidak meninggalkan satu orangpun di belakang (Leaving no one behind).

Kualitas pengelolaan lanskap dan pembangunan wilayah berkelanjutan yang setinggi-tingginya bukan saja akan ditentukan pada ketercapaian indikator keberhasilan per masing-masing Program/ Kegiatan Prioritas, namun juga akan sangat ditentukan oleh kesetimbangan capaian indikator antar 5 Tema Kelompok Program yang mewakili tujuan-tujuan pembangunan pada aspek produksi, konservasi, penghidupan masyarakat, kesejahteraan sosial serta penguatan pada aspek-aspek kelembagaan dan kebijakan pendukung.

Dokumentasi



Rapat Kerja PSU-PIU Bangka



Diskusi Tema Kolaborasi Muba



Diskusi dengan Ketua APhi Sumsel



Diskusi PSU-PIU dengan Privat sektor



Serial Diskusi Tematik



Serial Diskusi Tematik



Lokakarya Multipihak



Serah terima Masterplan dari Tim Penyusun kepada TIM PSU Kelola Sendang

